

BAB I

PENDAHULUAN

C. Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis memilih judul “**Normalisasi Hubungan Diplomatik Venezuela-Amerika Serikat (AS) Tahun 2009**” adalah karena adanya ketertarikan penulis terhadap kebijakan luar negeri Venezuela khususnya terkait kebijakan politik luar negeri Hugo Chavez untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan AS dibawah kepemimpinan presiden Barack Obama. Merupakan suatu perubahan kebijakan dari pihak Venezuela yang semula pada masa pemerintahan George W. Bush melancarkan politik luar negeri anti AS bahkan sampai terjadi pembekuan hubungan diplomatik kedua negara pada September 2008.

Pelantikan Barack Obama sebagai presiden baru AS pada awal tahun 2009, menjadi sebuah fenomena politik yang mendapat perhatian masyarakat internasional. Perubahan, seperti tema yang diusung Obama yang mengantarkannya menjadi presiden, memang sangat dibutuhkan baik bagi rakyat AS maupun masyarakat internasional untuk menuju era yang lebih baik. Lengsernya Bush dan terpilihnya Obama telah membuat Chavez mulai mengendurkan serangannya menjadi cenderung lebih lunak dan positif terhadap AS. Pada KTT OAS April 2009 yang lalu, Chavez dan pemerintahan Obama telah mencapai kesepakatan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dan akan membangun kemitraan yang setara antara Venezuela dan AS. Maka muncul pertanyaan bagi penulis mengapa hal tersebut dapat terjadi, padahal selama ini Hugo Chavez memiliki pandangan anti AS.

D. Latar Belakang Permasalahan

Pada masa presiden Betancourt Bello periode 1945-1948 dan 1959-1964, Venezuela memiliki hubungan dekat dengan AS. Kedekatan yang terjalin dimanfaatkan oleh AS untuk menanamkan pengaruhnya baik secara ekonomi maupun politik. AS gencar menerapkan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi liberal di kawasan Amerika Latin termasuk Venezuela serta membuat negara-negara tersebut bergantung kepada IMF dan Bank Dunia. Namun bagi Venezuela dan beberapa negara lainnya, resep-resep liberal IMF dan Bank Dunia yang berusaha ditanamkan di kawasan Amerika Latin mengalami kegagalan.

Venezuela merupakan negara dunia ketiga pertama yang dijadikan sebagai laboratorium eksperimen sistem ekonomi neoliberal oleh AS. Sejak tahun 1970an berbagai reformasi ekonomi dan kebijakan yang dianjurkan telah diterapkan namun tidak menghasilkan kemajuan ekonomi. Angka kemiskinan mencapai 33% di tahun 1975 dan meningkat 70% di akhir tahun 1995. Kemakmuran hanya dirasakan oleh kaum borjuis dan Venezuela menjadi negara dengan peringkat utama dalam kesenjangan distribusi kekayaan, dengan tingkat kesenjangan 19 kali lipat dari pada negara berkembang lainnya.¹

Krisis ekonomi yang melanda Venezuela telah membuat negara ini semakin terpuruk, karena krisis tersebut menyebabkan hutang negara dan swasta menjadi berkali lipat. Kondisi serupa juga dirasakan oleh negara-negara Amerika Latin

¹ Hidayat Mukmin, *Pergolakan di Amerika Latin dalam Dasawarsa ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hal. 62.

lainnya, sehingga memicu lahirnya para calon presiden di Argentina, Brasilia, Uruguay, Ekuador, dan Bolivia baru-baru ini yang menentang neo-liberalisme. Saat ini, para pemimpin populis terutama sekali menekankan diutamakannya egalitarisme (persamaan) sosial, dan tidak menghiraukan anjuran-anjuran yang diberikan oleh IMF dan pemerintah AS.²

Salah satu tokoh Amerika Latin yang memiliki pandangan negatif terhadap neoliberalisme adalah Hugo Rafael Chavez Frias, seorang revolusioner yang bertalar belakang militer berhasil menduduki kepemimpinan tertinggi di Venezuela melalui pemilu tahun 1998. Chavez memperoleh kemenangan sebesar 56% suara yang sebagian besar berasal dari rakyat miskin Venezuela atas Henrique Salas Romer yang didukung oleh partai AD dan COPEI. Pada masa kampanye Hugo Chavez menyerukan pentingnya dilakukan revolusi di dalam negeri Venezuela, yang kemudian dikenal dengan Revolusi Bolivarian. Melalui isu kampanye inilah Hugo Chavez memperoleh legitimasi dan kepercayaan rakyat Venezuela untuk melaksanakan revolusi tersebut.

Dibawah kepemimpinan Hugo Chavez, politik luar negeri Venezuela masih didasarkan pada dasar-dasar politik luar negeri Venezuela yang *Non-Alignment* menurut versi dunia ketiga yaitu hapusnya kolonialisme-imperialisme, hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, non intervensi, wajib menghormati perjanjian internasional, penyelesaian persengketaan antar negara secara damai,

² *Mengapa Amerika Latin Bergeser ke kiri*, (diunduh pada 20 Agustus 2009); dari <http://kontak.club.fr/Mengapa%20Amerika%20Latin%20bergeser%20ke%20kiri.htm>

solidaritas terhadap pemerintah-pemerintah yang demokratis, pembangunan industri dan pertanian untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan kerjasama ekonomi internasional.³ Dasar-dasar politik luar negeri tersebut mencerminkan Venezuela yang anti kolonialisme dan imperialisme dan telah ditunjukkan dengan politik luar negeri anti AS, sebagai negara imperialisme utama. Bahkan perang terbuka terhadap kebijakan neoliberal pun telah dilancarkan oleh pemerintah Hugo Chavez.

Kebijakan utama Hugo Chavez sebagai presiden adalah me-renasionalisasi perusahaan minyak negara yang telah mengalami privatisasi untuk dikuasai dan dikelola secara penuh oleh negara demi kesejahteraan rakyat Venezuela. Selain itu, Hugo Chavez berhasil menjalin hubungan dekat dengan Iran dan negara-negara sosialis Amerika Latin seperti Kuba, Bolivia, Ekuador, Argentina, dan Brazil untuk membentuk aliansi anti AS. Aliansi ini adalah penentang paling keras imperialisme dan hegemoni AS, masing-masing negara saling mendukung pelaksanaan kebijakan yang mendapat pertentangan dari AS.⁴

Sikap dan beberapa kebijakan lainnya yang sangat kontroversial telah membuat AS, dibawah kepemimpinan George W. Bush menunjukkan sikap permusuhannya kepada Hugo Chavez. Berbagai manuver politik terus diluncurkan baik oleh Chavez maupun Bush. Hingga pada puncaknya September 2008, kedua negara membekukan hubungan diplomatik dengan saling berbalas mengusir duta besar.

³ Hidayat Mukmin, *op.cit.*, hal. 180.

⁴ *Aliansi Iran-Venezuela Anti-Amerika*, (diunduh pada 20 Agustus 2009); dari <http://dafa.multiply.com/reviews/item/363>.

Pemilu presiden AS tahun 2008 merupakan sebuah awal perubahan bagi AS dan internasional dengan adanya seorang kandidat dari partai Demokrat yang mengusung tema “perubahan”. Seperti yang diketahui bahwa pemerintahan Bush telah membawa AS kedalam kondisi terburuk baik secara eksternal melalui kebijakan luar negerinya maupun resesi ekonomi internal. Perubahan kepemimpinan baru sangat dibutuhkan oleh AS untuk keluar dari kondisi tersebut.

Barack Obama telah berhasil menarik simpatik masyarakat AS dan internasional melebihi pemilihan presiden AS sebelumnya melalui rencana kebijakan luar negeri AS yang termuat dalam situs Barack Obama, diantaranya: mengakhiri perang di Irak, menutup penjara Guantanamo, menghentikan pertempuran melawan Al-Qaeda, memimpin dunia dalam memerangi ancaman umum seperti senjata nuklir, teroris, perubahan iklim dan kemiskinan, pemusnahan masal suatu bangsa dan penyebaran berbagai penyakit.⁵

Munculnya sosok pemimpin AS seperti Obama telah membuat para pemimpin negara-negara Amerika Latin memiliki pandangan positif dan menyatakan dukungannya kepada Obama. Mantan pemimpin Kuba yang menjadi "musuh bebuyutan" AS, Fidel Castro bahkan memuji Obama sebagai orang yang tidak diragukan lagi kecerdasannya. "Dia lebih pintar, lebih berbudaya dan lebih tenang dibandingkan lawannya (McCain)," kara Castro. Dukungan yang sama diberikan pula oleh presiden Venezuela, Hugo Chavez. Chavez mengatakan, dengan terpilihnya

⁵(diunduh pada 24 September 2009); dari <http://www.barackobama.com/issues/foreignpolicy>

Obama akan ada "sedikit sinar di kaki langit."⁶ Dengan sikap kooperatif dari Barack Obama, diharapkan dapat menciptakan suasana baru bagi hubungan AS dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin.

Terpilihnya presiden baru Barack Obama akan banyak membawa perubahan bagi AS khususnya kebijakan politik menyangkut hubungan luar negeri AS. Tidak hanya kebijakan menarik tentara dari Irak, Obama pun berusaha memulihkan hubungan baik dengan semua negara di dunia yang pada masa presiden sebelumnya mengalami ketegangan seperti Iran, Palestina, Kuba dan juga Venezuela.

Pada KTT OAS (*Organization of American States*) di Trinidad, 17 April 2009, Obama berusaha mendekati pemimpin tertinggi Venezuela dan upaya ini disambut baik oleh Chavez. Melalui pembicaraan informal antara presiden Venezuela Hugo Chavez dan Menlu AS Hillary Clinton, kedua negara mencapai kesepakatan untuk mencabut deklarasi status *Persona Non Grata* yang dikeluarkan tahun 2008 terhadap duta besar masing-masing negara dan akan menempatkan kembali duta besar negara seperti semula.⁷ Kembali ditempatkannya masing-masing duta besar negara telah menandakan hubungan diplomatik AS dan Venezuela akan kembali normal.

⁶ *Obama Menang, Dunia Arab Skeptis*, (diunduh pada 5 September 2009); dari <http://eramuslim.com/berita/analisa/obama-menang-dan-dunia-arab-yang-skeptis.htm>.

⁷ *AS, Venezuela Pulihkan Hubungan Diplomatik*, (diunduh pada 25 Juni 2009); dari <http://www.voanews.com/indonesian/archive/2009-06/2009-06-25-voa17.cfm>

E. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka muncul suatu rumusan permasalahan yang nantinya akan dibahas, yakni: *Mengapa presiden Hugo Chavez memutuskan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan AS mengikuti terpilihnya Barack Obama sebagai presiden AS?*

F. Kerangka Pemikiran

1. Teori Persepsi

Snyder, Bruck dan Sapin menekankan pentingnya arti persepsi dari para pelaku sebagai dasar orientasi pengambilan kebijakan dan persepsi menduduki tempat yang sentral dalam teori pembuatan kebijakan.⁸ Begitu pula dengan Mohtar Mas'ood, dalam bukunya menjelaskan bahwa ketika kita menganalisa kebijakan suatu negara maka penting untuk mengetahui/mempelajari persepsi para pemegang kekuasaan/wewenang *de jure* ketika mereka membuat kebijakan karena merekalah yang berbicara dan bertindak atas nama negara. Ada pun alasan mengapa penting bagi kita memperhatikan persepsi dan perilaku individu adalah bahwa negara-bangsa tidak melakukan tindakan, yang melakukan adalah para pemimpinnya dan persepsi memainkan peran dalam menentukan perilaku suatu negara.⁹

⁸ Charles A. McClelland, *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hal. 168.

⁹ Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*, (Yogyakarta: UGM, 1989), hal. 1-19.

Sedangkan K.J Holsti menjelaskan bahwa tindakan suatu negara bergantung pada cara pandang pemimpin negara itu terhadap suatu objek atau situasi tertentu dan persepsi mengandung nilai-nilai yang menjadi standar seorang pemimpin dalam mengartikan situasi yang dihadapi, apakah situasi itu baik atau buruk, merupakan ancaman atau bukan dan lain-lain.¹⁰ Jadi persepsi tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin memberikan persepsi terhadap kondisi di dalam negara atau negara lain, menurut nilai, keyakinannya sendiri dan didukung dengan informasi atau fakta.

Menurut Walter S. John persepsi dibedakan dalam tiga komponen yaitu nilai, keyakinan dan pengetahuan, dari ketiga komponen itu dapat membentuk persepsi seseorang, kelompok maupun negara. Nilai adalah preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibanding realitas lainnya, tidak mengacu pada apa yang ada melainkan apa yang seharusnya ada. Nilai memberikan harga relatif kepada objek dan kondisi dari realitas tertentu. Keyakinan adalah sikap bahwa suatu realitas adalah benar terbukti atau diketahui. Keyakinan sering didasarkan pada penerimaan informasi yang sebelumnya dari lingkungan. Pengetahuan adalah unsur kunci dalam pembentukan dan perubahan sistem perseptual.

Secara garis besar persepsi merupakan aktivitas penilaian seseorang atau seorang pemimpin terhadap suatu fenomena sosial atau obyek fisik yang berdasarkan faktor-faktor subyektifnya (pengalaman dan pengetahuan). Persepsi pemimpin negara

¹⁰ Holsti, K.J., *International Politics: Analysis Framework*, diterjemahkan oleh M. Tahir Azhary, dengan judul *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Jilid I Edisi ke 4, (Jakarta: Erlangga, 1998), hal. 138.

menjadi faktor penting yang berpengaruh besar terhadap persepsi nasional dan pengambilan kebijakan suatu negara. Perubahan persepsi seseorang atau persepsi nasional dapat terjadi ketika mengacu pada pengetahuan baru yang dapat merombak keyakinan dan nilai.¹¹ Dengan pengertian ketika memperoleh informasi/pengetahuan baru dan ternyata bertentangan dengan keyakinan dan nilai yang dipegang selama ini kemungkinan informasi tersebut dapat merubah segala sesuatu yang sudah dipegang agar sesuai dengan kenyataan yang sedang dihadapi.

Prioritas utama dari setiap kebijakan Chavez adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat Venezuela serta mensejahterakan dan memakmurkan negara Venezuela tanpa adanya campur tangan dari pihak asing yang besar seperti AS. Persepsi Hugo Chavez yang anti AS, berlandaskan sejarah yang menyatakan bahwa imperialisme AS hanya dapat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat Venezuela, benar atau tidaknya itu adalah persepsi Hugo Chavez selama dalam bayang-bayang AS yang dinyatakan gagal dalam membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan liberalnya di Venezuela.

Persepsi Venezuela terhadap AS tercermin dari persepsi Hugo Chavez terhadap AS yang dipengaruhi oleh persepsi Chavez terhadap sosok kepemimpinan negara tersebut. Chavez mempunyai persepsi negatif terhadap presiden Bush sehingga persepsi negatif pun dimiliki oleh Chavez terhadap AS. Ketika terjadi pergantian pemimpin di negara AS, maka Chavez akan mempunyai persepsi baru

¹¹ Jones, Walter S. *Logika Hubungan Internasional Persepsi Nasional*, Jilid I, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988), hal. 276.

terhadap AS tergantung pada persepsinya terhadap Barack Obama. Sosok Barack Obama sebagai presiden baru AS yang berlatar belakang Partai Demokrat akan berbeda dengan sosok George W. Bush dari partai Republik.

Penting bagi penulis untuk menjelaskan lebih rinci mengapa persepsi Hugo Chavez terhadap sosok pemimpin AS berpengaruh sekali terhadap pembentukan persepsi negara Venezuela terhadap AS. Hugo Chavez adalah presiden Venezuela yang memperoleh legitimasi politik secara prosedural yaitu melalui pemilu yang sangat demokratis pada Desember 1998. Besarnya kekuatan yang dimiliki oleh Chavez dalam menjalankan kekuasaannya sebagai presiden dapat dilihat dari 3 komponen.

Pertama, Chavez memperoleh kemenangan pada pemilu presiden selama tiga kali berturut-turut dengan perolehan suara sebesar 56%, 59.76%, dan 61% yang diikuti sekitar 78% dari total warga Venezuela. *Kedua*, fakta bahwa kebanyakan pendukung dari Revolusi Bolivarian di bawah pimpinan Chavez adalah para tentara dan tentara militer Venezuela menjadi bagian penting dari kekuatan Chavez untuk melaksanakan revolusi Bolivarian. *Ketiga*, Kekuatan oposisi baik didalam maupun diluar pemerintahan tidak cukup kuat untuk menjatuhkan kepemimpinan Chavez, terbukti setiap oposisi berusaha untuk menentang kebijakan Chavez dan bahkan menurunkannya dari kursi kepresidenan selalu berakhir dengan kegagalan.¹²

Dari ketiga komponen diatas, telah menunjukkan bahwa presiden Hugo Chavez mempunyai kekuasaan yang sangat kuat di dalam negerinya. Ditambah lagi

¹² Nurani Soyomukti, *Hugo Chavez Vs Amerika Serikat*, (Yogyakarta: Garasi, 2008), hal 80-81.

dengan posisi kuat yang dimiliki presiden Venezuela, yaitu kekuasaan untuk membubarkan Majelis Nasional melalui dekrit serta kekuasaan dari legislatif yang secara nyata dikurangi (akibat perubahan sistem politik dari bikameral menjadi unikameral) dan ditransferkan pada presiden. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Hugo Chavez mempunyai kekuasaan dominan di dalam negeri dan sah untuk kita menyatakan bahwa Hugo Chavez sebagai Venezuela. Berbagai persepsi yang dimiliki oleh Hugo Chavez akan sangat berpengaruh besar bagi pembentukan persepsi Venezuela dan bagi proses pembuatan kebijakan negara.

Persepsi terhadap Obama dibangun berdasarkan analisa dari rangkaian fakta yang ada. Barack Obama adalah presiden AS kulit hitam pertama dengan latar belakang keluarga yang sederhana. Obama juga merupakan tokoh politisi AS pertama yang menentang berbagai kebijakan pemerintahan Bush khususnya terkait keterlibatan AS dalam perang di Timur Tengah seperti perang Irak. Isu kampanye Obama pun dapat mencerminkan bahwa Obama memiliki sudut pandang politik berbeda dengan pemerintahan Bush. Bush lebih menekankan kebijakan *hard power* atau menggunakan pendekatan represif militer bagi negara yang bertentangan dengan AS, sedangkan Obama menggunakan pendekatan multilateralisme dan diplomasi melalui negosiasi dan dialog. Beberapa fakta tersebut kemudian didefinisikan oleh Chavez secara subyektif sehingga membentuk suatu persepsi tertentu terhadap Obama.

Persepsi Chavez bersifat Subyektif yaitu penilaian seseorang (Hugo Chavez) terhadap sikap dan kebijakan Obama berdasarkan faktor-faktor subyektifnya.

Perbedaan fakta dan nilai telah membentuk persepsi baru Hugo Chavez terhadap sosok pemimpin AS, Barak Obama dan persepsi baru tersebut merubah persepsi Venezuela yang semula anti AS menjadi lebih lunak dan positif. Persepsi positif ini juga akan mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Venezuela terhadap AS.

2. Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (*Decision Maker*) suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional.¹³ Politik luar negeri juga dipandang sebagai akibat dari tindakan rasional (*rational action*) yang dilakukan suatu negara dengan sengaja untuk mencapai kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional. Pembuatan kebijakan politik luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual.

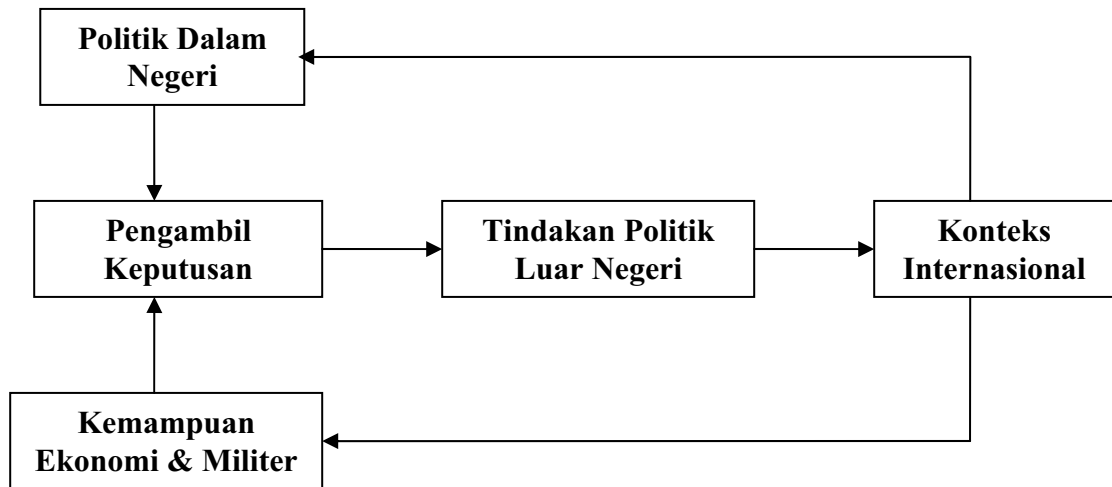
Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi, dalam analogi ini individu itu –melalui serangkaian tahap-tahap intelektual dengan menerapkan penalaran-penalaran yang sungguh-sungguh– berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada.¹⁴

¹³ Jack C. Plano dan Roy Olton terjemahan Drs. Wawan Juanda, *Kamus Hubungan Internasional*, Putra A Bardin, 1999.

¹⁴ Mas'oeed Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 234.

Skema Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri

William D. Coplin¹⁵



Secara umum, dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, para pengambil kebijakan dipengaruhi oleh faktor politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, dan konteks internasional.

a. Faktor politik dalam negeri sangat menentukan produk kebijakan luar negeri yang dibuat oleh para pembuat kebijakan (*decision maker*) suatu negara. Menurut William D. Coplin, hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri adalah hubungan untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Adapun aktor-aktor politik tersebut meliputi birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan, organisasi masa, dll yang disebut dengan “*policy influencers*” (yang mempengaruhi kebijakan).¹⁶

¹⁵ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*, edisi kedua Terjemahan oleh Mercedes Marbun, (Bandung: PT. Sinar Baru Algresindo, 2003), hal. 30.

¹⁶ *Ibid*, hal. 74.

Situasi politik dalam negeri Venezuela banyak diwarnai oleh aksi pemberontakan dan penentangan yang dilakukan oleh pihak oposisi pemerintah Hugo Chavez. Berbagai aksi pemberontakan dan penentangan dari oposisi ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan baik ekonomi, politik dalam negeri maupun politik luar negeri yang akan dan telah diambil oleh Hugo Chavez karena dirasa merugikan dan mengancam kesejahteraan dan kepentingan mereka.

b. Secara umum, dalam proses pembuatan kebijakan, para pengambil kebijakan politik luar negeri suatu negara mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya ketika menyusun politik luar negeri.¹⁷ Venezuela mempunyai sumber daya minyak yang melimpah. Menjadi salah satu negara terbesar produsen minyak dunia telah menjadikan Venezuela mempunyai peran cukup besar dalam pengendalian harga minyak dunia. Namun kekuatan ekonomi Venezuela tidak sebanding dengan kekuatan militernya.

c. Sedangkan pengaruh faktor konteks internasional dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dijelaskan dengan posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain di dalam sistem internasional.¹⁸ Lingkungan internasional dari Venezuela itu sendiri terdiri atas lokasi geografisnya, kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem internasional dan hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara Venezuela dengan negara-negara dilingkungan sekitar.

¹⁷ Ibid, hal. 110.

¹⁸ Ibid, hal. 166.

Dari penjabaran ketiga faktor yang secara umum dapat mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan luar negeri suatu negara, dalam kasus ini, dimana Venezuela mengambil kebijakan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan AS, Hugo Chavez sebagai aktor dominan dalam pembuat kebijakan luar negeri Venezuela lebih dipengaruhi oleh faktor politik dalam negeri.

Semenjak terpilihnya Hugo Chavez sebagai presiden Venezuela, berbagai kebijakan dalam negeri, baik ekonomi maupun politik telah mencerminkan kebijakan anti kapitalisme dan neo-liberalisme. Dengan kekuatan yang berasal dari dukungan sebagian besar rakyat Venezuela, Hugo Chavez menjalankan program-program sosialis yang ambisius yang ditujukan untuk memperbaiki dan mengembangkan tingkat kehidupan mayoritas rakyat yang hidup dalam garis kemiskinan menuju kesejahteraan dan kemakmuran.

Selama dua tahun pertamanya menjabat, Chavez menekankan reformasi politik dan nasionalisasi aset-aset ekonomi penting, khususnya perusahaan minyak milik negara. Pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan minyak ini sepenuhnya dipergunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah terutama untuk mengatasi persoalan kemiskinan, membangun fasilitas kesehatan dan perumahan, pendidikan murah dan pelayanan-pelayanan publik lainnya.

Berbagai kebijakan pemerintah dibawah kepemimpinan Hugo Chavez dinilai telah merugikan para pengusaha dalam negeri yang kontra-revolusi. Seperti kelas kapitalis Venezuela, yang terorganisir di dalam FEDECAMARAS (Asosiasi Pengusaha) tidak menginginkan perusahaan minyak Venezuela dinasionalisasi,

karena sangat merugikan mereka. Kerugian dan ancaman pun dirasakan oleh AS, maka dari itu pemerintah AS berusaha membantu gerakan oposisi untuk menggulingkan pemerintah Hugo Chavez yang menerapkan kebijakan yang berbeda (bahkan bertentangan) dengan neoliberalisme dan menerapkan sistem demokrasi partisipatoris.

Meskipun telah banyak upaya-upaya dari pihak oposisi untuk menggagalkan apa yang dijalankan oleh Chavez dan bahkan untuk menjatuhkannya namun Hugo Chavez berhasil mempertahankan kekuasaannya selama 11 tahun. Seperti kudeta yang dilancarkan dua bulan setelah Chavez menasionalisasi perusahaan minyak pada tahun 2002 hanya bertahan selama dua hari karena kekuatan rakyat yang terorganisir berhasil mengembalikan Chavez pada posisinya semula sebagai presiden Venezuela. Upaya lain juga dilakukan melalui mekanisme demokratis yaitu referendum pada awal tahun 2004. Pihak oposisi berusaha menggagalkan kekuatan untuk melakukan *recall* (pemanggilan kembali) atas Presiden Hugo Chavez, tetapi melalui referendum itu Hugo Chavez menang sekaligus membuktikan bahwa ia didukung oleh rakyatnya.¹⁹

Kekuatan dan dukungan yang berasal dari rakyat Venezuela menjadi modal bagi Chavez untuk menjalankan berbagai kebijakan dan kebijakan pendukung lainnya dalam rangka mewujudkan Revolusi Bolivarian sekalipun mendapat pertentangan dan perlawanan dari pihak yang kontra-revolusi. Seperti ketika pemerintah Hugo Chavez

¹⁹ Nurani Soyomukti, *Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dan Politik Radikal*, (Yogyakarta: Resist Book, 2007), hal. 106.

mengambil kebijakan luar negeri untuk membekukan hubungan diplomatik dengan AS. Namun ketika kondisi saat ini berbeda dengan kondisi sebelumnya dan pengaruh dari faktor persepsi positif Chavez terhadap pemerintahan baru AS, pemerintah Chavez mengambil kebijakan untuk memulihkan hubungan dengan AS. Meskipun kebijakan ini cenderung dinilai kontradiktif dari kebijakan semula tetapi tidak sampai melahirkan penentangan atau penolakan yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan tersebut baik dari rakyat yang pro-Chavez maupun oposisi.

G. Hypothesis

Berdasarkan pokok permasalahan dan kerangka pemikiran diatas maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa, **Venezuela mengambil kebijakan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan AS mengikuti terpilihnya Barack Obama sebagai presiden AS karena:**

- 1. Presiden Venezuela Hugo Chavez memiliki persepsi positif terhadap presiden Barack Obama, dan**
- 2. Ketiadaan penentangan yang kuat dari dalam negeri Venezuela terhadap kebijakan Hugo Chavez**

H. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjawab rumusan permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan menguji hipotesis dengan menggunakan data-data

kualitatif:

- Untuk menganalisa faktor persepsi Hugo Chavez terhadap presiden AS, Barack Obama dan faktor ketiadaan penentangan yang kuat dari dalam negeri terhadap kebijakan Hugo Chavez dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri Venezuela untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan AS.
2. Untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai politik luar negeri Venezuela dan perkembangan hubungan luar negerinya dengan AS.
 3. Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

I. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki batasan wilayah bahasan dalam menganalisa kebijakan politik luar negeri Venezuela terhadap AS pada masa pemerintahan presiden Hugo Chavez. Jangkauan penelitian ini dititik beratkan pada kurun waktu tahun 1998, awal kepemimpinan Hugo Chavez sampai tahun 2009 ketika Venezuela memutuskan untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan AS mengikuti terpilihnya Barack Obama sebagai presiden AS. Namun tidak menutup kemungkinan penulis mengambil informasi pada tahun-tahun sebelum periode tersebut selama diperlukan dan masih menyangkut kepentingan analisis.

Mengenai batasan ruang lingkup teori, tanpa bermaksud menganggap bahwa faktor-faktor yang lain tidak penting, dalam penggunaan teori kebijakan politik luar negeri penulis menekankan pada faktor politik dalam negeri (*politics domestic*). Dengan pertimbangan, Hugo Chavez sebagai aktor dominan dalam pembuat kebijakan luar negeri Venezuela, dalam mengambil kebijakan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan AS lebih dipengaruhi oleh faktor politik dalam negeri.

J. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatif (menjelaskan) yang bertujuan untuk menemukan faktor apa yang melatarbelakangi kejadian yang berwujud pada pengumpulan data yang didapat melalui data kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau *library research* ini melalui pengumpulan data atau informasi dan literatur sekunder yang bersumber dari buku-buku, media cetak (koran, jurnal, dll) dan internet (*website*) yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada tahap analisis, dilakukan pengklasifikasian atas data-data tersebut untuk digunakan sesuai kebutuhan dalam tahap pembuktian hipotesis dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif.

K. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan: Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Jangkauan

Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Kerangka Penulisan.

BAB II : Pada bab ini akan diuraikan mengenai Hubungan Bilateral antara Venezuela dan AS sebelum era Hugo Chavez secara ekonomi dan politik.

BAB III : Membahas tentang Dinamika Hubungan Diplomatik Venezuela-AS pada masa presiden Hugo Chavez meliputi kebijakan pemerintah Hugo Chavez, pembekuan hubungan diplomatik dengan AS dan pencapaian kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik Venezuela dengan AS.

BAB IV : Membahas tentang Faktor Persepsi dan Kondisi politik domestik dalam normalisasi hubungan diplomatik Venezuela-AS, dengan sub bab persepsi Hugo Chavez terhadap kebijakan Obama dan ketiadaan penentangan yang kuat dari dalam negeri terhadap kebijakan Hugo Chavez.

BAB V : Kesimpulan